## LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 01 SERI: D

# PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BEKASI PERIHAL PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI

### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah maka perlu dibuat Laporan Pertanggungjawaban Walikota perihal Perhitungan Anggaran Bekasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2000 seri D);

## Memperhatikan ; 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996,

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

# Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BEKASI PERIHAL
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000.

### Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

Rp. 125.895.734.591,38

Jumlah

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

#### Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan ..... Rp. Nihil

### Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, menurut C-I/A tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah ( C I ), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Pendapatan ( C/I ), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran C/I ), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R ), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini:
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan ( C/I/P ) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah Ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP ) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini yaitu :
  - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

Lamplran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bekasi pada tanggal 15Mei 2001

WALIKOTA BEKASI Ttd / Cap

Drs. H. I\I. SONTHAINIE

Diundangkan di Bekasi Pada tanggal 15 Mei 2001

an.SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI ASISTEN I

Drs. H. AMINUDDIN BASRI, MM PEMBINA NIP. 480 057 068

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI D